



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KECAMAN KERAS INDONESIA ATAS SERANGAN ISRAEL KE QATAR

Sita Hidriyah

Analisis Legislatif Ahli Madya

sita.hidriyah@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 12 September 2025 Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan ke Doha, Qatar, untuk bertemu langsung dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Kunjungan ini merupakan respons cepat terhadap serangan udara Israel yang menargetkan pemimpin senior Hamas di Doha pada 9 September 2025. Serangan tersebut menewaskan setidaknya lima anggota Hamas dan satu petugas keamanan Qatar, serta mengganggu upaya mediasi gencatan senjata Gaza yang difasilitasi Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir. Qatar, sebagai markas biro politik Hamas, menjadi target karena perannya sebagai mediator utama dalam konflik Israel-Palestina. Selain itu, serangan Israel ke Qatar tidak hanya dilihat sebagai operasi militer, tetapi juga sebagai tindakan politik yang disengaja untuk merusak proses perdamaian dan menciptakan ketidakstabilan baru.

Dalam kesempatan lain, sebuah pertemuan darurat digelar oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 15 September 2025. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut di Doha, Qatar, sebagai wakil dari Presiden Prabowo. Dalam pernyataannya di hadapan para pemimpin negara, Menlu Sugiono menegaskan bahwa agresi Israel merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kedaulatan sebuah negara. Ia menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan konsekuensi tragis dari pengecualian hukum yang telah dinikmati Israel selama puluhan tahun. Mewakili Indonesia, Menlu Sugiono juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menghentikan agresi dan memastikan akuntabilitas atas tindakan tersebut.

Secara umum, reaksi dari negara-negara Arab dan Islam tersebut berupa kecaman dan pengutukan keras. Namun, solidaritas dan dukungan untuk Qatar juga mengalir dikarenakan pola pikir bahwa serangan terhadap satu negara Arab sama dengan menyerang semua negara Arab. Hal ini juga menjadi hasil kesepakatan dari KTT selain menyatakan solidaritas pada Qatar, yaitu para peserta KTT mendesak tindakan tegas termasuk kemungkinan menghentikan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel.

Kesepakatan KTT ini sejalan dengan Indonesia sebagai salah satu anggota yang berdiri dalam solidaritas untuk Qatar sekaligus menegaskan kembali komitmen terhadap perdamaian di Timur Tengah. Disamping itu, pernyataan keras Israel kepada Qatar telah memicu kekhawatiran yang meluas di seluruh dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Serangan ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan, tetapi juga sebagai ancaman yang merusak stabilitas regional. Secara keseluruhan, kekhawatiran terbesar adalah bahwa agresi ini akan membuat perdamaian di Timur Tengah semakin sulit dicapai dan mendorong kawasan tersebut ke dalam fase ketidakstabilan yang lebih parah. Respons Indonesia atas serangan ini sangat jelas, yaitu menolak segala bentuk agresi yang melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara, serta menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Atensi DPR

Komisi I DPR melalui fungsi pengawasan dapat memiliki peran penting dalam menanggapi serangan Israel ke Qatar, terutama melalui fungsi diplomasi parlemen. Meskipun kebijakan luar negeri secara umum berada di bawah wewenang pemerintah (eksekutif), DPR RI memiliki peran sebagai "jalur diplomasi kedua" (*second track diplomacy*) yang melengkapi diplomasi pemerintah. Peran dan tindakan ini dapat menunjukkan sikap tegas Indonesia sebagai negara yang menentang kekerasan dan pelanggaran kedaulatan. DPR RI, melalui fungsi pengawasan, dapat mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret, seperti mendorong pemerintah agar secara aktif berkoordinasi dengan negara-negara lain, khususnya di forum regional seperti ASEAN dan global seperti PBB, untuk menekan Israel, memastikan pemerintah mengambil sikap tegas dalam forum internasional, dan mendukung kebijakan pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, yang telah terbang ke Doha sebagai bentuk solidaritas.

Sumber

antaranews.com, 16 September 2025;
cnbc.com, 16 September 2025;
cnnindonesia.com, 16 September 2025;
kompas.com, 13 September 2025;
trtindonesia.com, 10 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra R. Oktaviano
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*